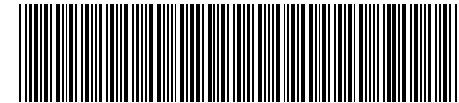




**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA-151.01-0/2026**



DS:5899-6458-5268-5792

A. DASAR HUKUM :

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

B. DENGAN INI DISAHKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK :

- | | | |
|--------------------------------|---|--|
| 1. KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA | : | 151 KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL |
| 2. UNIT ORGANISASI | : | 151.01 SEKRETARIAT JENDERAL |
| 3. PAGU | : | Rp.480.661.751.000 |
- (EMPAT RATUS DELAPAN PULUH MILIAR ENAM RATUS ENAM PULUH SATU JUTA TUJUH RATUS LIMA PULUH SATU RIBU RUPIAH)

C. PERNYATAAN SYARAT DAN KETENTUAN(DISCLAIMER) :

1. DIPA Induk yang telah disahkan ini lebih lanjut dituangkan kedalam DIPA Petikan untuk masing-masing Satker.
2. Pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan pengesahan DIPA Petikan.
3. DIPA Induk tidak berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan atau dasar pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA Induk merupakan akumulasi rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan dari seluruh satker.
5. Tanggung jawab terhadap kebenaran alokasi yang tertuang dalam DIPA Induk sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. DIPA Induk ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

LUKY ALFIRMAN
NIP.197003271995031002



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA-151.01-0/2026



DS:5899-6458-5268-5792

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

Halaman : 1 dari 4

A. IDENTITAS UNIT :

1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA	: 151	KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
2. UNIT ORGANISASI	: 01	SEKRETARIAT JENDERAL
3. PAGU	: Rp.480.661.751.000	
(EMPAT RATUS DELAPAN PULUH MILIAR ENAM RATUS ENAM PULUH SATU JUTA TUJUH RATUS LIMA PULUH SATU RIBU RUPIAH)		

B. KETERKAITAN DENGAN PROGRAM, SASARAN STRATEGIS K/L, FUNGSI, DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DALAM RKP :

(dalam ribuan rupiah)

1. PROGRAM	: 151.01.WA	Program Dukungan Manajemen	480.661.751
2. SASARAN STRATEGIS K/L	: 01	Berkembangnya status pembangunan desa	
	: 02	Menurunnya angka kemiskinan desa	
	: 03	Meningkatnya kapasitas desa dan perdesaan serta daerah tertinggal berdaya saing secara ekonomi yang bersinergi dengan pembangunan perkotaan dan wilayah sekitarnya serta memiliki ketahanan sosial dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan	
	: 04	Meningkatnya kualitas hidup dengan dipenuhinya akses terhadap layanan dasar dan infrastruktur dan perdesaan	
	: 05	Meningkatnya tata kelola dan pemberdayaan desa adaptif	
	: 06	Meningkatnya transformasi pembangunan daerah tertinggal dan sangat tertinggal	
	: 07	Meningkatkan kualitas implementasi kebijakan desa dan perdesaan serta daerah tertinggal	
	: 08	Meningkatkan layanan penyediaan data dan informasi perdesaan	
	: 09	Terwujudnya organisasi yang memiliki kapasitas dan reformasi birokrasi yang berkualitas	
	: 10	Terwujudnya organisasi yang baik dalam pengawasan, pengendalian dan akuntabilitas aparatur serta aturan yang efektif	
	: 11	Meningkatnya kapasitas SDM kementerian dan SDM desa dan daerah tertinggal	
	: 12	Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan yang berbasis pada ilmu pengetahuan, inovasi, serta data dan informasi dalam keterpaduan rencana untuk meningkatkan daya saing pembangunan desa dan daerah tertinggal	
3. FUNGSI	: 06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	480.661.751
SUB FUNGSI	: 0690	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA	480.661.751
4. NON PRIORITAS NASIONAL	:		480.661.751



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA-151.01-0/2026



DS:5899-6458-5268-5792

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

Halaman : 2 dari 4

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :

(dalam ribuan rupiah)

KODE	PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	VOLUME / SATUAN	ALOKASI DANA
151.01.WA	Program Dukungan Manajemen		480.661.751
SP13	Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi (RB)		
IKP01	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	67,58 Nilai	
IKP05	Indeks Efektivitas Kelembagaan	81 Nilai	
7340	Penyelenggaraan Legislasi dan Advokasi Hukum		4.500.000
01.01	Tingkat koordinasi dengan Kementerian Hukum dalam proses harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan	20,5 Nilai	
01.02	Kompetensi Perancang Peraturan Perundang-Undangan yang berkualitas	19,6 Nilai	
01.03	Kualitas re-regulasi atau deregulasi Peraturan Perundang-Undangan berdasarkan hasil reuiu	30 Nilai	
01.04	Penataan Database Peraturan Perundang-Undangan	20 Nilai	
02.01	Persentase Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan sesuai dengan program pembentukan Peraturan	100 Persentase (%)	
02.02	Persentase Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan sesuai usulan dari pemrakarsa	100 Persentase (%)	
02.03	Persentase Pemberian Pertimbangan, Pelayanan dan Advokasi hukum yang ditangani dalam setiap tingkatan	100 Persentase (%)	
7341	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik		8.000.000
01.01	Persentase pengaduan masyarakat (LAPOR) yang telah ditindaklanjuti	82 Persentase (%)	
02.01	Persentase dokumen pendukung penilaian pelayanan publik yang tersedia	90 Persentas (%)	
02.02	Jumlah Dokumen Strategi Komunikasi Bulanan yang tersusun	12 Dokumen	
02.03	Persentase kegiatan Kementerian yang terpublikasikan sesuai agenda publikasi bulanan	95 Persentase (%)	
02.04	Persentase fasilitasi hubungan kelembagaan yang ditindaklanjuti	81,5 Persentase (%)	
03.01	Rata-rata nilai dimensi kepatuhan standar pelayanan publik	90,5 Persentase (%)	
04.02	Nilai kepuasan masyarakat atas pelayanan informasi publik	80,5 Nilai	
04.04	Nilai kepuasan masyarakat atas pelayanan pengaduan masyarakat	80,5 Nilai	



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA-151.01-0/2026



DS:5899-6458-5268-5792

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

Halaman : 3 dari 4

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :

(dalam ribuan rupiah)

KODE	PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	VOLUME / SATUAN		ALOKASI DANA
7342	Pengelolaan Perencanaan dan Kerja Sama			7.000.000
	01.01 Nilai komponen perencanaan SAKIP Kementerian	22,27	Nilai	
	01.02 Nilai Komponen Pengukuran SAKIP Kementerian	17,26	Nilai	
	01.03 Nilai Komponen Pelaporan SAKIP Kementerian	11,59	Nilai	
	01.04 Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Sekretariat Jenderal	73,62	Nilai	
	02.01 Nilai Kinerja Anggaran kementerian	90,81	Nilai	
	02.02 Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional	93	Nilai	
	02.03 Manajemen Risiko Indeks	3,371	Nilai	
	02.04 Persentase kerjasama program/kegiatan yang teranggarkan dalam dokumen perencanaan	90	Persentase (%)	
7343	Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Reformasi Birokrasi			5.500.000
	01.01 Skor Penilaian Evaluasi Kelembagaan	81,50	Persentase (%)	
	02.01 Persentase Aspek Perencanaan Kebutuhan	94	Persentase (%)	
	02.02 Persentase Aspek Pengadaan	95	Persentase (%)	
	02.03 Persentase Aspek Pengembangan Karir	75	Persentase (%)	
	02.04 Persentase Aspek Promosi dan Mutasi	75	Persentase (%)	
	02.05 Persentase Aspek Manajemen Kinerja	91	Persentase (%)	
	02.06 Persentase Aspek Penggajian, Penghargaan, dan Disiplin	94	Persentase (%)	
	02.07 Persentase Aspek Perlindungan dan Pelayanan	100	Persentase (%)	
	02.08 Persentase Aspek Sistem Informasi	83	Persentase (%)	
	03.01 Nilai Survei Implementasi Budaya ASN	70,5	Nilai	
7344	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara			340.515.579
	01.01 Nilai Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran Kementerian	93	Nilai	



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA-151.01-0/2026



DS:5899-6458-5268-5792

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

Halaman : 4 dari 4

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :

(dalam ribuan rupiah)

KODE	PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	VOLUME / SATUAN		ALOKASI DANA
7345	01.02 Nilai Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kementerian	93	Nilai	115.146.172
	01.03 Nilai Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran Kementerian	93	Nilai	
	01.04 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Jenderal	93	Nilai	
	02.01 Nilai rata-rata Penilaian Mandiri Indeks Pengelolaan Aset UAPPB- E1 dan UAKPB	3,10	Nilai	
	03.01 Jumlah Dokumen Laporan Keuangan dan Laporan Barang Pengguna Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan tepat waktu	1	Dokumen	
	Pengelolaan Layanan Pengadaan dan Umum			
	01.01 Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN	3	Nilai	
	01.02 Jumlah dokumen pelaksanaan pengasuransian BMN di lingkungan Sekretariat Jenderal	1	Dokumen	
	02.01 Nilai Pengawasan Kearsipan	90	Nilai	
	02.02 Nilai Pengawasan Kearsipan Sekretariat Jenderal	95	Nilai	
	03.01 Nilai Pemanfaatan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Sistem Informasi	81	Nilai	
	03.02 Nilai Kualifikasi dan Kompetensi SDM Pengadaan Barang/Jasa	81	Nilai	
	03.03 Nilai Tingkat Kematangan UKPBJ	81	85	

KETENTUAN

DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.

Jakarta, 01 Desember 2025
a.n. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
Sekretaris Jenderal

Dr. Taufik Madjid, S.Sos, M.Si.
NIP. 197107011999031013

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA-151.01-0/2026
II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER



A. IDENTITAS UNIT :

1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA :

151 KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

2. UNIT ORGANISASI :

151.01 SEKRETARIAT JENDERAL

3. PAGU :

Rp.480.661.751.000

(EMPAT RATUS DELAPAN PULUH MILIAR ENAM RATUS ENAM PULUH SATU JUTA TUJUH RATUS LIMA PULUH SATU RIBU RUPIAH)

B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER (dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA	KP KD DK TP UB	JENIS BELANJA				PAGU/TARGET PENDAPATAN	TERCATAT
				PEGAWAI	BARANG	MODAL	BANTUAN SOSIAL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5+6+7+8	10
	151.01.WA	Program Dukungan Manajemen	KP	334.147.570	143.320.181	3.194.000	0	480.661.751	8.822.740
	01	DKI JAKARTA		334.147.570	143.320.181	3.194.000	0	480.661.751	8.822.740
	694612	SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL		334.147.570	143.320.181	3.194.000	0	480.661.751	8.822.740
	A00	RM		334.147.570	143.320.181	3.194.000	0	480.661.751	8.822.740
		TOTAL		334.147.570	143.320.181	3.194.000	0	480.661.751	8.822.740
		RM PENDAPATAN		334.147.570	143.320.181	3.194.000	0	480.661.751 0	8.822.740

KETENTUAN
DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.

Jakarta, 01 Desember 2025
a.n. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
Sekretaris Jenderal

Dr. Taufik Madjid, S.Sos, M.Si.
NIP. 197107011999031013



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA-151.01-0/2026
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:5899-6458-5268-5792

A. IDENTITAS UNIT :

1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA : 151 KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
2. UNIT ORGANISASI : 151.01 SEKRETARIAT JENDERAL
3. PAGU : Rp.480.661.751.000
(EMPAT RATUS DELAPAN PULUH MILIAR ENAM RATUS ENAM PULUH SATU JUTA TUJUH RATUS LIMA PULUH SATU RIBU RUPIAH)

B. RENCANA PER PROGRAM

(dalam ribuan rupiah)

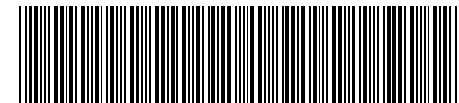
NO	KODE	URAIAN PROGRAM	PAGU	JANUARI	PEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER
1	151.01.WA	Program Dukungan Manajemen RENCANA PENARIKAN DANA	480.661.751	32.497.865	33.547.030	58.163.616	35.445.573	36.474.504	58.303.472	36.879.004	36.976.426	37.341.807	37.658.998	37.873.862	39.499.594
		TOTAL RENCANA PENARIKAN DANA	480.661.751	32.497.865	33.547.030	58.163.616	35.445.573	36.474.504	58.303.472	36.879.004	36.976.426	37.341.807	37.658.998	37.873.862	39.499.594
		TOTAL PERKIRAAN / TARGET PENDAPATAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Jakarta, 01 Desember 2025
a.n. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
Sekretaris Jenderal

Dr. Taufik Madjid, S.Sos, M.Si.
NIP. 197107011999031013



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA-151.02-0/2026**



DS:0580-0583-6790-9754

A. DASAR HUKUM :

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

B. DENGAN INI DISAHKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK :

- | | | |
|--------------------------------|---|--|
| 1. KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA | : | 151 KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL |
| 2. UNIT ORGANISASI | : | 151.02 INSPEKTORAT JENDERAL |
| 3. PAGU | : | Rp.23.334.047.000 |
- (DUA PULUH TIGA MILIAR TIGA RATUS TIGA PULUH EMPAT JUTA EMPAT PULUH TUJUH RIBU RUPIAH)

C. PERNYATAAN SYARAT DAN KETENTUAN(DISCLAIMER) :

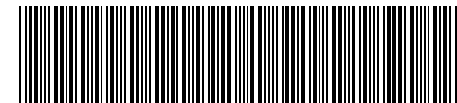
1. DIPA Induk yang telah disahkan ini lebih lanjut dituangkan kedalam DIPA Petikan untuk masing-masing Satker.
2. Pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan pengesahan DIPA Petikan.
3. DIPA Induk tidak berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan atau dasar pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA Induk merupakan akumulasi rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan dari seluruh satker.
5. Tanggung jawab terhadap kebenaran alokasi yang tertuang dalam DIPA Induk sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. DIPA Induk ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

LUKY ALFIRMAN
NIP.197003271995031002



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA-151.02-0/2026



DS:0580-0583-6790-9754

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

Halaman : 1 dari 4

A. IDENTITAS UNIT :

1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA	: 151	KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
2. UNIT ORGANISASI	: 02	INSPEKTORAT JENDERAL
3. PAGU	: Rp.23.334.047.000	
(DUA PULUH TIGA MILIAR TIGA RATUS TIGA PULUH EMPAT JUTA EMPAT PULUH TUJUH RIBU RUPIAH)		

B. KETERKAITAN DENGAN PROGRAM, SASARAN STRATEGIS K/L, FUNGSI, DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DALAM RKP :

(dalam ribuan rupiah)

1. PROGRAM	: 151.02.WA	Program Dukungan Manajemen	23.334.047
2. SASARAN STRATEGIS K/L	: 01	Berkembangnya status pembangunan desa	
	: 02	Menurunnya angka kemiskinan desa	
	: 03	Meningkatnya kapasitas desa dan perdesaan serta daerah tertinggal berdaya saing secara ekonomi yang bersinergi dengan pembangunan perkotaan dan wilayah sekitarnya serta memiliki ketahanan sosial dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan	
	: 04	Meningkatnya kualitas hidup dengan dipenuhinya akses terhadap layanan dasar dan infrastruktur dan perdesaan	
	: 05	Meningkatnya tata kelola dan pemberdayaan desa adaptif	
	: 06	Meningkatnya transformasi pembangunan daerah tertinggal dan sangat tertinggal	
	: 07	Meningkatkan kualitas implementasi kebijakan desa dan perdesaan serta daerah tertinggal	
	: 08	Meningkatkan layanan penyediaan data dan informasi perdesaan	
	: 09	Terwujudnya organisasi yang memiliki kapasitas dan reformasi birokrasi yang berkualitas	
	: 10	Terwujudnya organisasi yang baik dalam pengawasan, pengendalian dan akuntabilitas aparatur serta aturan yang efektif	
	: 11	Meningkatnya kapasitas SDM kementerian dan SDM desa dan daerah tertinggal	
	: 12	Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan yang berbasis pada ilmu pengetahuan, inovasi, serta data dan informasi dalam keterpaduan rencana untuk meningkatkan daya saing pembangunan desa dan daerah tertinggal	
3. FUNGSI	: 06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	23.334.047
SUB FUNGSI	: 0690	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA	23.334.047
4. NON PRIORITAS NASIONAL	:		23.334.047



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA-151.02-0/2026



DS:0580-0583-6790-9754

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

Halaman : 2 dari 4

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :

(dalam ribuan rupiah)

KODE	PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	VOLUME / SATUAN		ALOKASI DANA
151.02.WA	Program Dukungan Manajemen			23.334.047
SP16	Meningkatnya Pengawasan Internal			
7333	Dukungan Manajemen Eselon I Inspektorat Jenderal			13.834.047
	01.01 Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Inspektorat Jenderal	82.7	Nilai	
	01.02 Opini atas Pengendalian internal atas Laporan Keuangan dan BMN Inspektorat Jenderal berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dari hasil evaluasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)/ Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	PIE	Kriteria	
	01.03 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran di Lingkungan Inspektorat Jenderal	80	Nilai	
	01.04 Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) di Lingkungan Inspektorat Jenderal	94	Nilai	
	01.05 Persentase (%) produk hukum yang ditetapkan pada tahun yang bersangkutan	75	Persentase (%)	
	01.06 Rata-rata nilai Pengawasan Kearsipan di Lingkungan Inspektorat Jenderal	94.5	Nilai	
	01.07 Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat Jenderal	71	Nilai	
	01.08 Persentase (%) prasarana dan sarana kerja yang terpenuhi berdasarkan RKBMN	85	Persentase (%)	
	02.01 Nilai rata rata Kematangan Penerapan Manajemen Risiko	3.4	Nilai	
	03.01 Persentase (%) Rekomendasi yang ditindaklanjuti dari hasil Pengawasan lingkup Itjen	80	Persentase (%)	
7334	Pengawasan Internal, Pengendalian, dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur			9.500.000
	01.01 Persentase (%) tindak lanjut hasil Area of Improvement (AOI) SPIP	40	Persentase (%)	
	02.01 Tingkat efektivitas pembangunan zona integritas	2	Unit	
	03.01 Persentase (%) Implementasi hasil pemantauan dan evaluasi internal atas Kegiatan Utama dan RARB (KU-RARB) yang ditindaklanjuti	82	Persentase (%)	
	03.02 Nilai komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal SAKIP Kementerian	16.46	Nilai	
	04.01 Persentase (%) Rekomendasi yang ditindaklanjuti dari hasil pengawasan internal (Inspektorat I)	73	Persentase (%)	



**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA-151.02-0/2026**



DS:0580-0583-6790-9754

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

Halaman : 3 dari 4

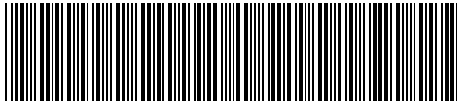
C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :

(dalam ribuan rupiah)

KODE	PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	VOLUME / SATUAN		ALOKASI DANA
04.02	Persentase (%) Rekomendasi yang ditindaklanjuti dari hasil pengawasan internal (Inspektorat II)	73	Persentase (%)	
04.03	Persentase (%) Rekomendasi yang ditindaklanjuti dari hasil pengawasan internal (Inspektorat III)	73	Persentase (%)	
04.04	Persentase (%) Rekomendasi yang ditindaklanjuti dari hasil pengawasan internal (Inspektorat IV)	73	Persentase (%)	
04.05	Persentase (%) Rekomendasi yang ditindaklanjuti dari hasil pengawasan internal (Inspektorat V)	73	Persentase (%)	
05.01	Persentase (%) Rekomendasi yang ditindaklanjuti dari hasil pengawasan eksternal (Inspektorat I)	73	Persentase (%)	
05.02	Persentase (%) Rekomendasi yang ditindaklanjuti dari hasil pengawasan eksternal (Inspektorat II)	73	Persentase (%)	
05.03	Persentase (%) Rekomendasi yang ditindaklanjuti dari hasil pengawasan eksternal (Inspektorat III)	73	Persentase (%)	
05.04	Persentase (%) Rekomendasi yang ditindaklanjuti dari hasil pengawasan eksternal (Inspektorat IV)	73	Persentase (%)	
05.05	Persentase (%) Rekomendasi yang ditindaklanjuti dari hasil pengawasan eksternal (Inspektorat V)	73	Persentase (%)	
06.01	Persentase (%) tindak lanjut rencana aksi hasil SPI	60	Persentase (%)	
06.02	Persentase (%) penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kewenangan	83	Persentase (%)	
07.01	Persentase (%) rata-rata materialitas atas koreksi hasil reviu laporan keuangan UKE I yang disusun	<4	Persentase (%)	
07.02	Persentase (%) Rekomendasi hasil reviu encana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) yang ditindaklanjuti	91	Persentase (%)	
07.03	Persentase (%) tindak lanjut Catatan Hasil Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada seluruh UKE I	75	Persentase (%)	
08.01	Persentase (%) dokumentasi audit yang terdigitalisasi melalui Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) (Inspektorat I)	75	Persentase (%)	
08.02	Persentase (%) Pengawasan Berbasis CA-CM (Inspektorat I)	65	Persentase (%)	
08.03	Persentase (%) dokumentasi audit yang terdigitalisasi melalui Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) (Inspektorat II)	75	Persentase (%)	
08.04	Persentase (%) Pengawasan Berbasis CA-CM (Inspektorat II)	65	Persentase (%)	
08.05	Persentase (%) dokumentasi audit yang terdigitalisasi melalui Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) (Inspektorat III)	75	Persentase (%)	
08.06	Persentase (%) Pengawasan Berbasis CA-CM (Inspektorat III)	65	Persentase (%)	
08.07	Persentase (%) dokumentasi audit yang terdigitalisasi melalui Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) (Inspektorat IV)	75	Persentase (%)	
08.08	Persentase (%) Pengawasan Berbasis CA-CM (Inspektorat IV)	65	Persentase	



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA-151.02-0/2026



DS:0580-0583-6790-9754

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :

(dalam ribuan rupiah)

KODE	PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	VOLUME / SATUAN		ALOKASI DANA
08.09	Persentase (%) dokumentasi audit yang terdigitalisasi melalui Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) (Inspektorat V)	75	Persentase (%)	
08.10	Persentase (%) Pengawasan Berbasis CA-CM (Inspektorat V)	65	Persentase (%)	
09.01	Persentase (%) Rekomendasi hasil evaluasi kapabilitas APIP yang ditindaklanjuti	86	Persentase (%)	

KETENTUAN
DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.

Jakarta, 01 Desember 2025
a.n MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
SEKRETARIS JENDERAL

Dr. Taufik Madjid, S.Sos., M.Si.
NIP. 197107011999031013

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA-151.02-0/2026
II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER



A. IDENTITAS UNIT :

1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA :

151 KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

2. UNIT ORGANISASI :

151.02 INSPEKTORAT JENDERAL

3. PAGU :

Rp.23.334.047.000
(DUA PULUH TIGA MILIAR TIGA RATUS TIGA PULUH EMPAT JUTA EMPAT PULUH TUJUH RIBU RUPIAH)

B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER (dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA	KP KD DK TP UB	JENIS BELANJA				PAGU/TARGET PENDAPATAN	TERCATAT
				PEGAWAI	BARANG	MODAL	BANTUAN SOSIAL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5+6+7+8	10
	151.02.WA	Program Dukungan Manajemen	KP	1.743.215	20.196.463	1.394.369	0	23.334.047	0
	01	DKI JAKARTA		1.743.215	20.196.463	1.394.369	0	23.334.047	0
	694540	INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL		1.743.215	20.196.463	1.394.369	0	23.334.047	0
	A00	RM		1.743.215	20.196.463	1.394.369	0	23.334.047	0
		TOTAL		1.743.215	20.196.463	1.394.369	0	23.334.047	0
		RM PENDAPATAN		1.743.215	20.196.463	1.394.369	0	23.334.047 0	0

KETENTUAN

DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.

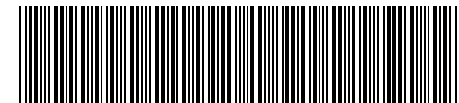
Jakarta, 01 Desember 2025

a.n MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
SEKRETARIS JENDERAL

Dr. Taufik Madjid, S.Sos., M.Si.
NIP. 197107011999031013



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA-151.02-0/2026
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:0580-0583-6790-9754

A. IDENTITAS UNIT :

1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA : 151 KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
2. UNIT ORGANISASI : 151.02 INSPEKTORAT JENDERAL
3. PAGU : Rp.23.334.047.000
(DUA PULUH TIGA MILIAR TIGA RATUS TIGA PULUH EMPAT JUTA EMPAT PULUH TUJUH RIBU RUPIAH)

B. RENCANA PER PROGRAM

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN PROGRAM	PAGU	JANUARI	PEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER
1	151.02.WA	Program Dukungan Manajemen RENCANA PENARIKAN DANA	23.334.047	270.092	1.528.264	1.448.603	1.896.746	2.296.746	1.859.226	2.123.384	2.335.291	2.149.226	1.899.226	2.105.638	3.421.604
		TOTAL RENCANA PENARIKAN DANA	23.334.047	270.092	1.528.264	1.448.603	1.896.746	2.296.746	1.859.226	2.123.384	2.335.291	2.149.226	1.899.226	2.105.638	3.421.604
		TOTAL PERKIRAAN / TARGET PENDAPATAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Jakarta, 01 Desember 2025
a.n MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
SEKRETARIS JENDERAL

Dr. Taufik Madjid, S.Sos., M.Si.
NIP. 197107011999031013



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA-151.03-0/2026**



A. DASAR HUKUM :

- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

B. DENGAN INI DISAHKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK :

- | | | |
|--------------------------------|---|---|
| 1. KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA | : | 151 KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL |
| 2. UNIT ORGANISASI | : | 151.03 DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN |
| 3. PAGU | : | Rp.218.220.409.000 |
- (DUA RATUS DELAPAN BELAS MILIAR DUA RATUS DUA PULUH JUTA EMPAT RATUS SEMBILAN RIBU RUPIAH)

C. PERNYATAAN SYARAT DAN KETENTUAN(DISCLAIMER) :

- DIPA Induk yang telah disahkan ini lebih lanjut dituangkan kedalam DIPA Petikan untuk masing-masing Satker.
- Pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan pengesahan DIPA Petikan.
- DIPA Induk tidak berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan atau dasar pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA Induk merupakan akumulasi rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan dari seluruh satker.
- Tanggung jawab terhadap kebenaran alokasi yang tertuang dalam DIPA Induk sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- DIPA Induk ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

LUKY ALFIRMAN
NIP.197003271995031002



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA-151.03-0/2026



DS:6859-1014-2003-0090

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

Halaman : 1 dari 5

A. IDENTITAS UNIT :

1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA	: 151	KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
2. UNIT ORGANISASI	: 03	DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN
3. PAGU	: Rp.218.220.409.000	
(DUA RATUS DELAPAN BELAS MILIAR DUA RATUS DUA PULUH JUTA EMPAT RATUS SEMBILAN RIBU RUPIAH)		

B. KETERKAITAN DENGAN PROGRAM, SASARAN STRATEGIS K/L, FUNGSI, DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DALAM RKP :

(dalam ribuan rupiah)

1. PROGRAM	: 151.03.CT	Program Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	191.164.246
	: 151.03.WA	Program Dukungan Manajemen	27.056.163
2. SASARAN STRATEGIS K/L	: 01	Berkembangnya status pembangunan desa	
	: 02	Menurunnya angka kemiskinan desa	
	: 03	Meningkatnya kapasitas desa dan perdesaan serta daerah tertinggal berdaya saing secara ekonomi yang bersinergi dengan pembangunan perkotaan dan wilayah sekitarnya serta memiliki ketahanan sosial dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan	
	: 04	Meningkatnya kualitas hidup dengan dipenuhinya akses terhadap layanan dasar dan infrastruktur dan perdesaan	
	: 05	Meningkatnya tata kelola dan pemberdayaan desa adaptif	
	: 06	Meningkatnya transformasi pembangunan daerah tertinggal dan sangat tertinggal	
	: 07	Meningkatkan kualitas implementasi kebijakan desa dan perdesaan serta daerah tertinggal	
	: 08	Meningkatkan layanan penyediaan data dan informasi perdesaan	
	: 09	Terwujudnya organisasi yang memiliki kapasitas dan reformasi birokrasi yang berkualitas	
	: 10	Terwujudnya organisasi yang baik dalam pengawasan, pengendalian dan akuntabilitas aparatur serta aturan yang efektif	
	: 11	Meningkatnya kapasitas SDM kementerian dan SDM desa dan daerah tertinggal	
	: 12	Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan yang berbasis pada ilmu pengetahuan, inovasi, serta data dan informasi dalam keterpaduan rencana untuk meningkatkan daya saing pembangunan desa dan daerah tertinggal	
3. FUNGSI	: 06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	218.220.409
SUB FUNGSI	: 0690	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA	218.220.409
4. PRIORITAS NASIONAL	: 06	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	187.664.246
NON PRIORITAS NASIONAL	:		30.556.163



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA-151.03-0/2026



DS:6859-1014-2003-0090

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

Halaman : 2 dari 5

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :

(dalam ribuan rupiah)

KODE	PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	VOLUME / SATUAN		ALOKASI DANA
151.03.CT	Program Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal			191.164.246
SP01	Meningkatnya layanan sosial dasar, pengelolaan SDA, dan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim			
IKP01	Persentase Desa Berketahanan Iklim	35,73	Persentase (%)	
IKP02	Persentase Desa yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	26,25	Persentase (%)	
IKP03	Persentase desa yang mendapatkan layanan pendidikan dasar	4,59	Persentase (%)	
IKP04	Persentase desa yang mengembangkan desa model tematik yang berstatus mandiri	56,39	Persentase (%)	
SP02	Meningkatnya Pemberdayaan Desa Adaptif			
IKP01	Persentase Desa yang menerapkan layanan berbasis digital	82,0	Persentase (%)	
SP06	Meningkatnya daya saing kawasan perdesaan dan kemandirian desa di kawasan perdesaan			
SP07	Meningkatnya alokasi APBDes dan kegiatan K/L untuk program penurunan kemiskinan di desa			
7322	Pembangunan Desa dan Perdesaan			191.164.246
01.01	Persentase Desa dengan Sistem Pembuangan Air Limbah Rumah Tangga yang Baik mendukung Ketahanan Iklim	35,73	Persentase (%)	
01.02	Persentase Desa dengan Utilias Air Minum yang Baik mendukung ketahanan Iklim	18,16	Persentase (%)	
01.03	Persentase Desa dengan Kondisi Akses Jalan yang Baik Mendukung ketahanan iklim	22,00	Persentase (%)	
01.04	Persentase Desa dengan Akses Listrik yang Baik mendukung ketahanan iklim	18,03	Persentase (%)	
01.05	Persentase Desa dengan Layanan Telekomunikasi yang Baik mendukung ketahanan Iklim	45,77	Persentase (%)	
01.06	Persentase Desa dengan Fasilitas Pendukung Ekonomi yang Baik mendukung ketahanan Iklim	2,12	Persentase (%)	
01.07	Persentase Desa dengan Sistem Pengelolaan Sampah yang Baik mendukung Ketahanan Iklim	14,06	Persentase (%)	
01.08	Persentase Desa dengan Kearifan Lingkungan yang Baik mendukung Ketahanan iklim	11,24	Persentase (%)	
01.09	Persentase Desa dengan Aktivitas Sosial yang Baik mendukung Ketahanan iklim	19,09	Persentase (%)	



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA-151.03-0/2026



DS:6859-1014-2003-0090

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

Halaman : 3 dari 5

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :

(dalam ribuan rupiah)

KODE	PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	VOLUME / SATUAN		ALOKASI DANA
	02.01 Persentase Desa yang Sarana Kesehatan dan Fasilitas Kesehatan meningkat mendukung Kemandirian Desa	48,38	Persentase (%)	
	02.02 Persentase Desa yang Aktivitas Layanan Kesehatan, Layanan Tenaga Kesehatan, dan Jaminan Kesehatan Nasional meningkat mendukung Kemandirian Desa	2,68	Persentase (%)	
	03.01 Persentase Desa yang ketersediaan layanan pendidikan dasarnya meningkat mendukung kemandirian desa	9,19	Persentase (%)	
	03.02 Persentase Desa yang Angka Partisipasi Murni (APM)-nya meningkat mendukung kemandirian desa	28,44	Persentase (%)	
	04.01 Persentase Desa yang mengembangkan Model Tematik Bidang Pariwisata	64,47	Persentase (%)	
	04.02 Persentase Desa yang mengembangkan Model Tematik Bidang Pertanian/Perkebunan/Peternakan/Perikanan	57,29	Persentase (%)	
	05.01 Persentase desa yang laporan pemanfaatan dana desanya terpublikasi	100	Persentase (%)	
	06.01 Evaluasi status perkembangan Desa dan Kawasan perdesaan prioritas	2	Dokumen	
	07.01 Jumlah kebijakan rencana teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan yang ditetapkan	1	Dokumen	
	07.02 Persentase program/kegiatan hasil koordinasi internal Ditjen PDP yang diimplementasikan sesuai dengan dokumen Perencanaan Teknis pembangunan Desa dan Perdesaan	80	Persentase (%)	
	07.03 Persentase desa yang mendapatkan advokasi bidang desa dan perdesaan	80	Persentase (%)	
	08.01 Persentase desa yang memanfaatkan Dana Desa sesuai dengan prioritas dalam mendukung penanganan kemiskinan	100	Persentase (%)	
	09.01 Persentase program/kegiatan hasil koordinasi eksternal Kementerian (K/L/D) yang diimplementasikan sesuai dengan dokumen rencana aksi pembangunan Desa dan Perdesaan	45	Persentase (%)	
151.03.WA	Program Dukungan Manajemen			27.056.163
SP13	Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi (RB)			
IKP02	Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	94,5	Nilai	
IKP03	Nilai Indeks Pengelolaan Aset (IPA)	3,10	Nilai	



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA-151.03-0/2026



I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

Halaman : 4 dari 5

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :

(dalam ribuan rupiah)

KODE	PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	VOLUME / SATUAN	ALOKASI DANA
IKP04	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	WTP Nilai	
IKP06	Indeks Penerapan Sistem Merit	0,86 Nilai	
IKP07	Indeks Budaya Aparatur Sipil Negara (ASN)	70,5 Nilai	
IKP08	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan	3 Nilai	
IKP09	Indeks Pelayanan Publik	4,43 Nilai	
IKP10	Tingkat kepatuhan standar pelayanan publik	93,35 Nilai	
IKP11	Survei kepuasan masyarakat	90,25 Nilai	
IKP12	Indeks Reformasi Hukum	90,1 Nilai	
IKP13	Tingkat Digitalisasi Arsip	93 Nilai	
IKP14	Indeks Tata Kelola Pengadaan	82 Nilai	
SP16	Meningkatnya Pengawasan Internal		
7335	Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan		27.056.163
01.01	Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	84 Nilai	
01.02	Opini atas Pengendalian Internal atas Laporan Keuangan dan BMN di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	PIE Kriteria	
01.03	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	94 Nilai	
01.04	Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	94 Nilai	
01.05	Persentase produk hukum yang ditetapkan pada tahun yang bersangkutan	95 Persentase (%)	
01.06	Rata-Rata nilai pengawasan kearsipan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	91 Nilai	
01.07	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	71 Nilai	
01.08	Presentase prasarana dan sarana kerja yang terpenuhi	85 Persentase (%)	
02.01	Nilai rata rata Kematangan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	71 Nilai	

Jakarta, 01 Desember 2025
a.n. MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
DIREKTUR JENDERAL

NUGROHO SETIJO NAGORO
NIP. 197006041995031002



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA-151.03-0/2026**



DS:6859-1014-2003-0090

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

Halaman : 5 dari 5

KETENTUAN

DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.

Jakarta, 01 Desember 2025
a.n. MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
DIREKTUR JENDERAL

NUGROHO SETIJO NAGORO
NIP. 197006041995031002



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA-151.03-0/2026



DS:6859-1014-2003-0090

II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

Halaman : 1 dari 1

A. IDENTITAS UNIT :

1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA : 151 KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
2. UNIT ORGANISASI : 151.03 DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN
3. PAGU : Rp.218.220.409.000
(DUA RATUS DELAPAN BELAS MILIAR DUA RATUS DUA PULUH JUTA EMPAT RATUS SEMBILAN RIBU RUPIAH)

B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA	KP KD DK TP UB	JENIS BELANJA				PAGU/TARGET PENDAPATAN	TERCATAT
				PEGAWAI	BARANG	MODAL	BANTUAN SOSIAL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5+6+7+8	10
	151.03.CT	Program Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	KP	0	191.164.246	0	0	191.164.246	125.331.596
	01	DKI JAKARTA		0	191.164.246	0	0	191.164.246	125.331.596
	694541	DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN		0	191.164.246	0	0	191.164.246	125.331.596
	A00	RM		0	173.300.000	0	0	173.300.000	112.950.000
	I33	HLN		0	17.864.246	0	0	17.864.246	12.381.596
	151.03.WA	Program Dukungan Manajemen	KP	5.254.662	20.601.501	1.200.000	0	27.056.163	0
	01	DKI JAKARTA		5.254.662	20.601.501	1.200.000	0	27.056.163	0
	694541	DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN		5.254.662	20.601.501	1.200.000	0	27.056.163	0
	A00	RM		5.254.662	20.601.501	1.200.000	0	27.056.163	0
		TOTAL		5.254.662	211.765.747	1.200.000	0	218.220.409	125.331.596
		RM		5.254.662	193.901.501	1.200.000	0	200.356.163	112.950.000
		HLN		0	17.864.246	0	0	17.864.246	12.381.596
		PENDAPATAN						0	

KETENTUAN

DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.

Jakarta, 01 Desember 2025
a.n. MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
DIREKTUR JENDERAL

NUGROHO SETIJO NAGORO
NIP. 197006041995031002



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA-151.03-0/2026
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:6859-1014-2003-0090

A. IDENTITAS UNIT :

1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA : 151 KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
2. UNIT ORGANISASI : 151.03 DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN
3. PAGU : Rp.218.220.409.000
(DUA RATUS DELAPAN BELAS MILIAR DUA RATUS DUA PULUH JUTA EMPAT RATUS SEMBILAN RIBU RUPIAH)

B. RENCANA PER PROGRAM

(dalam ribuan rupiah)

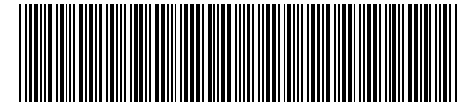
NO	KODE	URAIAN PROGRAM	PAGU	JANUARI	PEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER
1	151.03.CT	Program Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal													
		RENCANA PENARIKAN DANA	191.164.246	1.248.133	1.796.823	3.574.736	15.033.393	15.008.970	20.138.388	25.263.098	27.683.057	24.549.111	20.852.786	19.500.382	16.515.368
2	151.03.WA	Program Dukungan Manajemen													
		RENCANA PENARIKAN DANA	27.056.163	517.559	1.581.712	2.435.670	2.848.606	3.010.040	3.589.838	2.959.640	2.689.581	2.359.347	2.158.815	1.698.340	1.207.015
		TOTAL RENCANA PENARIKAN DANA	218.220.409	1.765.692	3.378.535	6.010.407	17.882.000	18.019.009	23.728.226	28.222.739	30.372.638	26.908.458	23.011.601	21.198.723	17.722.383
		TOTAL PERKIRAAN / TARGET PENDAPATAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Jakarta, 01 Desember 2025
a.n. MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
DIREKTUR JENDERAL

NUGROHO SETIJO NAGORO
NIP. 197006041995031002



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA-151.04-0/2026**



DS:9497-0753-1872-1101

A. DASAR HUKUM :

- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

B. DENGAN INI DISAHKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK :

- | | | |
|--------------------------------|---|--|
| 1. KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA | : | 151 KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL |
| 2. UNIT ORGANISASI | : | 151.04 DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKONOMI DAN INVESTASI DESA DAN DAERAH TERTINGGAL |
| 3. PAGU | : | Rp.348.204.346.000 |
- (TIGA RATUS EMPAT PULUH DELAPAN MILIAR DUA RATUS EMPAT JUTA TIGA RATUS EMPAT PULUH ENAM RIBU RUPIAH)

C. PERNYATAAN SYARAT DAN KETENTUAN(DISCLAIMER) :

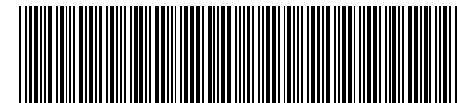
- DIPA Induk yang telah disahkan ini lebih lanjut dituangkan kedalam DIPA Petikan untuk masing-masing Satker.
- Pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan pengesahan DIPA Petikan.
- DIPA Induk tidak berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan atau dasar pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA Induk merupakan akumulasi rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan dari seluruh satker.
- Tanggung jawab terhadap kebenaran alokasi yang tertuang dalam DIPA Induk sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- DIPA Induk ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

LUKY ALFIRMAN
NIP.197003271995031002



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA-151.04-0/2026



DS:9497-0753-1872-1101

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

Halaman : 1 dari 4

A. IDENTITAS UNIT :

1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA	: 151	KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
2. UNIT ORGANISASI	: 04	DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKONOMI DAN INVESTASI DESA DAN DAERAH TERTINGGAL
3. PAGU	: Rp.348.204.346.000	
(TIGA RATUS EMPAT PULUH DELAPAN MILIAR DUA RATUS EMPAT JUTA TIGA RATUS EMPAT PULUH ENAM RIBU RUPIAH)		

B. KETERKAITAN DENGAN PROGRAM, SASARAN STRATEGIS K/L, FUNGSI, DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DALAM RKP :

(dalam ribuan rupiah)

1. PROGRAM	: 151.04.CT	Program Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	324.365.487
	: 151.04.WA	Program Dukungan Manajemen	23.838.859
2. SASARAN STRATEGIS K/L	: 01	Berkembangnya status pembangunan desa	
	: 02	Menurunnya angka kemiskinan desa	
	: 03	Meningkatnya kapasitas desa dan perdesaan serta daerah tertinggal berdaya saing secara ekonomi yang bersinergi dengan pembangunan perkotaan dan wilayah sekitarnya serta memiliki ketahanan sosial dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan	
	: 04	Meningkatnya kualitas hidup dengan dipenuhinya akses terhadap layanan dasar dan infrastruktur dan perdesaan	
	: 05	Meningkatnya tata kelola dan pemberdayaan desa adaptif	
	: 06	Meningkatnya transformasi pembangunan daerah tertinggal dan sangat tertinggal	
	: 07	Meningkatkan kualitas implementasi kebijakan desa dan perdesaan serta daerah tertinggal	
	: 08	Meningkatkan layanan penyediaan data dan informasi perdesaan	
	: 09	Terwujudnya organisasi yang memiliki kapasitas dan reformasi birokrasi yang berkualitas	
	: 10	Terwujudnya organisasi yang baik dalam pengawasan, pengendalian dan akuntabilitas aparatur serta aturan yang efektif	
	: 11	Meningkatnya kapasitas SDM kementerian dan SDM desa dan daerah tertinggal	
	: 12	Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan yang berbasis pada ilmu pengetahuan, inovasi, serta data dan informasi dalam keterpaduan rencana untuk meningkatkan daya saing pembangunan desa dan daerah tertinggal	
3. FUNGSI	: 06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	348.204.346
SUB FUNGSI	: 0690	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA	348.204.346
4. PRIORITAS NASIONAL	: 06	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	320.665.487
NON PRIORITAS NASIONAL	:		27.538.859



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA-151.04-0/2026



DS:9497-0753-1872-1101

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

Halaman : 2 dari 4

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :

(dalam ribuan rupiah)

KODE	PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	VOLUME / SATUAN	ALOKASI DANA
151.04.CT	Program Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal		324.365.487
SP08	Meningkatnya peran BUM Desa dalam mendukung penurunan kemiskinan		
IKP01	Persentase masyarakat desa penerima manfaat layanan/usaha BUM Desa	5 Persentase (%)	
SP09	Meningkatnya omzet BUM Desa yang berbadan hukum		
IKP01	Persentase BUM Desa berbadan hukum yang omzetnya meningkat	49,34 Persentase (%)	
SP10	Tersedianya kesepahaman / kerjasama kemitraan usaha antara BUM Desa dengan Koperasi Desa Merah Putih		
7325	Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal		324.365.487
01.01	Persentase (%) masyarakat yang berperan serta dalam pengembangan BUM Desa	5 % (Persentase)	
02.01	Persentase (%) afirmasi rencana kegiatan berdasarkan rencana pengembangan ekonomi dan investasi dalam pengembangan usaha BUM Desa.	25 Persentase (%)	
02.02	Jumlah BUM Desa yang meningkat kualitas tata kelola kelembagaan dan manfaatnya	60 BUMDesa	
02.03	Jumlah BUM Desa Bersama yang meningkat kualitas tata kelola kelembagaan dan manfaatnya	15 BUMDesaMa	
02.04	Persentase (%) Desa yang BUM Desanya telah mengembangkan Produk Unggulan Desa (PrUDes).	9,07 Persentase (%)	
02.05	Persentase (%) desa yang BUM Desanya mempromosikan dan memasarkan PrUDes	3,20 Persentase (%)	
02.06	Persentase (%) rata-rata pertambahan investasi BUM Desa	3 Persentase (%)	
03.01	Jumlah BUM Desa yang berbadan hukum	30.707 BUM Desa	
03.02	Jumlah Kerja Sama Investasi yang difasilitasi	1.750 Kerja Sama	
151.04.WA	Program Dukungan Manajemen		23.838.859
SP13	Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi (RB)		



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA-151.04-0/2026



DS:9497-0753-1872-1101

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

Halaman : 3 dari 4

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :

(dalam ribuan rupiah)

KODE	PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	VOLUME / SATUAN	ALOKASI DANA
SP16	Meningkatnya Pengawasan Internal		
IKP01	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,344 Nilai	
IKP02	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	1 Unit Kerja	
IKP03	Persentase Capaian Strategi Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	81 Persentase (%)	
IKP04	Persentase Tata Kelola Tindak Lanjut Rekomendasi hasil Pengawasan	72 Persentase (%)	
IKP05	Indeks Integritas	76 Nilai	
IKP06	Persentase materialitas atas koreksi hasil reviu Laporan Keuangan Kementerian yang disusun	<4 Persentase (%)	
IKP07	Persentase implementasi Continuous Audit dan Continuous Monitoring (CA-CM) pada Inspektorat Jenderal	30 Persentase (%)	
IKP08	Nilai kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3,6 Nilai	
7336	Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal		23.838.859
01.01	Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal	84 Nilai	
01.02	Opini atas Pengendalian Internal atas Laporan Keuangan dan BMN di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal	PIE Kriteria	
01.03	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal	93 Nilai	
01.04	Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal	94 Nilai	
01.05	Persentase produk hukum yang ditetapkan pada tahun yang bersangkutan	95 Persentase (%)	
01.06	Rata-rata nilai Pengawasan Kearsipan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal	91 Niai	
01.07	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal	71 Niai	
01.08	Presentase prasarana dan sarana kerja yang terpenuhi	85 Persentase (%)	
02.01	Nilai rata rata Kematangan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal	71 Nilai	

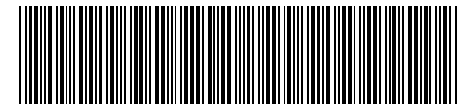
Jakarta, 01 Desember 2025
a.n. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah

Dr. H. Tabrani, M.Pd.
196807121994121005



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA-151.04-0/2026
I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM**



DS:9497-0753-1872-1101

Halaman : 4 dari 4

KETENTUAN

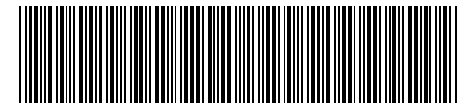
DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.

Jakarta, 01 Desember 2025
a.n. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah

Dr. H. Tabrani, M.Pd.
196807121994121005



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA-151.04-0/2026



DS:9497-0753-1872-1101

II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

Halaman : 1 dari 1

A. IDENTITAS UNIT :

1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA : 151 KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
2. UNIT ORGANISASI : 151.04 DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKONOMI DAN INVESTASI DESA DAN DAERAH TERTINGGAL
3. PAGU : Rp.348.204.346.000
(TIGA RATUS EMPAT PULUH DELAPAN MILIAR DUA RATUS EMPAT JUTA TIGA RATUS EMPAT PULUH ENAM RIBU RUPIAH)

B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA	KP KD DK TP UB	JENIS BELANJA				PAGU/TARGET PENDAPATAN	TERCATAT
				PEGAWAI	BARANG	MODAL	BANTUAN SOSIAL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5+6+7+8	10
	151.04.CT	Program Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	KP	0	324.365.487	0	0	324.365.487	300.077.363
	01	DKI JAKARTA		0	324.365.487	0	0	324.365.487	300.077.363
	694542	DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKONOMI DAN INVESTASI DESA DAN DAERAH		0	324.365.487	0	0	324.365.487	300.077.363
	A00	RM		0	128.104.124	0	0	128.104.124	103.816.000
	B13	PLN		0	196.261.363	0	0	196.261.363	196.261.363
	151.04.WA	Program Dukungan Manajemen	KP	3.315.665	20.023.194	500.000	0	23.838.859	0
	01	DKI JAKARTA		3.315.665	20.023.194	500.000	0	23.838.859	0
	694542	DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKONOMI DAN INVESTASI DESA DAN DAERAH		3.315.665	20.023.194	500.000	0	23.838.859	0
	A00	RM		3.315.665	20.023.194	500.000	0	23.838.859	0
		TOTAL		3.315.665	344.388.681	500.000	0	348.204.346	300.077.363
		RM		3.315.665	148.127.318	500.000	0	151.942.983	103.816.000
		PLN		0	196.261.363	0	0	196.261.363	196.261.363
		PENDAPATAN						0	

KETENTUAN

DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.

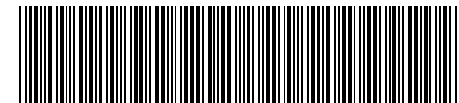
Jakarta, 01 Desember 2025

a.n. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah

Dr. H. Tabrani, M.Pd.
196807121994121005



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA-151.04-0/2026
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:9497-0753-1872-1101

Halaman : 1 dari 1

A. IDENTITAS UNIT :

1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA : 151 KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
2. UNIT ORGANISASI : 151.04 DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKONOMI DAN INVESTASI DESA DAN DAERAH TERTINGGAL
3. PAGU : Rp.348.204.346.000
(TIGA RATUS EMPAT PULUH DELAPAN MILIAR DUA RATUS EMPAT JUTA TIGA RATUS EMPAT PULUH ENAM RIBU RUPIAH)

B. RENCANA PER PROGRAM

(dalam ribuan rupiah)

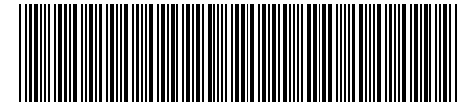
NO	KODE	URAIAN PROGRAM	PAGU	JANUARI	PEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER
1	151.04.CT	Program Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal													
		RENCANA PENARIKAN DANA	324.365.487	2.449.894	1.658.327	7.059.776	11.915.470	16.908.580	28.785.891	52.440.953	30.490.310	72.158.601	29.104.366	23.837.090	47.556.230
2	151.04.WA	Program Dukungan Manajemen													
		RENCANA PENARIKAN DANA	23.838.859	1.057.434	1.057.434	1.751.355	2.267.603	2.363.334	2.363.334	2.363.334	2.363.334	2.482.860	1.980.595	1.315.997	2.472.247
		TOTAL RENCANA PENARIKAN DANA	348.204.346	3.507.328	2.715.761	8.811.131	14.183.073	19.271.914	31.149.225	54.804.286	32.853.644	74.641.461	31.084.960	25.153.087	50.028.477
		TOTAL PERKIRAAN / TARGET PENDAPATAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Jakarta, 01 Desember 2025
a.n. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah

Dr. H. Tabrani, M.Pd.
196807121994121005



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA-151.05-0/2026**



DS:7299-9857-9503-6991

A. DASAR HUKUM :

- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

B. DENGAN INI DISAHKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK :

- | | | |
|--------------------------------|---|---|
| 1. KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA | : | 151 KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL |
| 2. UNIT ORGANISASI | : | 151.05 DIREKTORAT JENDERAL PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL |
| 3. PAGU | : | Rp.48.213.172.000 |
- (EMPAT PULUH DELAPAN MILIAR DUA RATUS TIGA BELAS JUTA SERATUS TUJUH PULUH DUA RIBU RUPIAH)

C. PERNYATAAN SYARAT DAN KETENTUAN(DISCLAIMER) :

- DIPA Induk yang telah disahkan ini lebih lanjut dituangkan kedalam DIPA Petikan untuk masing-masing Satker.
- Pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan pengesahan DIPA Petikan.
- DIPA Induk tidak berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan atau dasar pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA Induk merupakan akumulasi rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan dari seluruh satker.
- Tanggung jawab terhadap kebenaran alokasi yang tertuang dalam DIPA Induk sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- DIPA Induk ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

LUKY ALFIRMAN
NIP.197003271995031002



**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA-151.05-0/2026**



DS:7299-9857-9503-6991

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

Halaman : 1 dari 4

A. IDENTITAS UNIT :

1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA	: 151	KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
2. UNIT ORGANISASI	: 05	DIREKTORAT JENDERAL PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
3. PAGU	: Rp.48.213.172.000	
(EMPAT PULUH DELAPAN MILIAR DUA RATUS TIGA BELAS JUTA SERATUS TUJUH PULUH DUA RIBU RUPIAH)		

B. KETERKAITAN DENGAN PROGRAM, SASARAN STRATEGIS K/L, FUNGSI, DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DALAM RKP :

(dalam ribuan rupiah)

1. PROGRAM	: 151.05.CT	Program Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	24.500.000
	: 151.05.WA	Program Dukungan Manajemen	23.713.172
2. SASARAN STRATEGIS K/L	: 01	Berkembangnya status pembangunan desa	
	: 02	Menurunnya angka kemiskinan desa	
	: 03	Meningkatnya kapasitas desa dan perdesaan serta daerah tertinggal berdaya saing secara ekonomi yang bersinergi dengan pembangunan perkotaan dan wilayah sekitarnya serta memiliki ketahanan sosial dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan	
	: 04	Meningkatnya kualitas hidup dengan dipenuhinya akses terhadap layanan dasar dan infrastruktur dan perdesaan	
	: 05	Meningkatnya tata kelola dan pemberdayaan desa adaptif	
	: 06	Meningkatnya transformasi pembangunan daerah tertinggal dan sangat tertinggal	
	: 07	Meningkatkan kualitas implementasi kebijakan desa dan perdesaan serta daerah tertinggal	
	: 08	Meningkatkan layanan penyediaan data dan informasi perdesaan	
	: 09	Terwujudnya organisasi yang memiliki kapasitas dan reformasi birokrasi yang berkualitas	
	: 10	Terwujudnya organisasi yang baik dalam pengawasan, pengendalian dan akuntabilitas aparatur serta aturan yang efektif	
	: 11	Meningkatnya kapasitas SDM kementerian dan SDM desa dan daerah tertinggal	
	: 12	Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan yang berbasis pada ilmu pengetahuan, inovasi, serta data dan informasi dalam keterpaduan rencana untuk meningkatkan daya saing pembangunan desa dan daerah tertinggal	
3. FUNGSI	: 06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	48.213.172
SUB FUNGSI	: 0690	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA	48.213.172
4. PRIORITAS NASIONAL	: 06	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	24.300.000
NON PRIORITAS NASIONAL	:		23.913.172



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA-151.05-0/2026



DS:7299-9857-9503-6991

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

Halaman : 2 dari 4

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :

(dalam ribuan rupiah)

KODE	PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	VOLUME / SATUAN	ALOKASI DANA
151.05.CT	Program Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal		24.500.000
SP04	Meningkatnya Kemandirian Perdesaan pada Daerah Tertinggal		
SP11	Meningkatnya Rata-Rata Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Menurunnya Persentase Penduduk Miskin (PPM) di Daerah Tertinggal		
IKP01	Rata-Rata Nilai IPM di Daerah Tertinggal	59,69 Persentase (%)	
IKP02	Rata-Rata Nilai PPM di Daerah Tertinggal	29,61 Persentase (%)	
SP12	Meningkatnya Rata-rata alokasi APBD dan jumlah kegiatan K/L di Kabupaten Daerah tertinggal untuk penanggulangan kemiskinan		
IKP01	Persentase alokasi APBD di Kabupaten daerah tertinggal untuk penanggulangan kemiskinan	15,0 Persentase (%)	
IKP02	Persentase program/kegiatan K/L di Kabupaten daerah tertinggal untuk penanggulangan kemiskinan sesuai dengan dokumen perencanaan	72,5 Persentase (%)	
7326	Penyerasian Pembangunan Daerah Tertinggal		24.500.000
01.01	Persentase (%) desa yang mendapatkan layanan kesehatan di daerah tertinggal	26,1 Persentase	
01.02	Persentase (%) desa yang mendapatkan layanan kesehatan pada daerah khusus di daerah tertinggal	26,1 Persentase	
02.01	Persentase (%) Desa yang menerapkan layanan berbasis digital di daerah tertinggal	82 Persentase	
03.01	Persentase (%) desa berketahanan iklim di daerah tertinggal	35,7 Persentase	
03.02	Persentase (%) desa berketahanan iklim pada daerah Khusus di daerah tertinggal	35,7 Persentase	
04.01	Persentase (%) rencana program / kegiatan (Kementerian / Lembaga / Daerah / Masyarakat) dalam percepatan pembangunan daerah tertinggal yang disepakati untuk diimplementasikan di daerah tertinggal	77,5 Persentase	
05.01	Persentase (%) program/kegiatan percepatan pembangunan daerah tertinggal (Kementerian / Lembaga / Daerah / Masyarakat) dalam meningkatkan layanan dasar (Kesehatan dan Pendidikan) yang diimplementasikan di daerah tertinggal	77,5 Persentase	
06.01	Persentase (%) program/kegiatan percepatan pembangunan daerah tertinggal (Kementerian / Lembaga / Daerah / Masyarakat) dalam meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar dan konektivitas yang diimplementasikan di daerah tertinggal	77,5 Persentase	
07.01	Persentase (%) program/kegiatan percepatan pembangunan daerah tertinggal (Kementerian / Lembaga / Daerah / Masyarakat) dalam meningkatkan pembangunan daerah khusus yang diimplementasikan di daerah tertinggal	77,5 Persentase	
08.01	Persentase (%) kemiskinan di desa pada daerah tertinggal	10,54 Persentase	



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA-151.05-0/2026



DS:7299-9857-9503-6991

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

Halaman : 3 dari 4

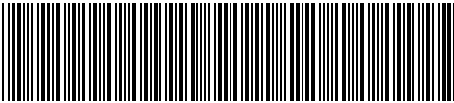
C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :

(dalam ribuan rupiah)

KODE	PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	VOLUME / SATUAN		ALOKASI DANA
151.05.WA	09.01 Jumlah dokumen penyelenggaraan percepatan pembangunan daerah tertinggal yang ditetapkan	4	Dokumen	23.713.172
	10.01 Persentase (%) rencana program / kegiatan (Kementerian / Lembaga / Daerah / Masyarakat) untuk menanggulangi kemiskinan di daerah tertinggal yang disepakati untuk diimplementasikan di daerah tertinggal	77,5	Persentase	
	11.01 Persentase (%) program/kegiatan K/L untuk penanggulangan kemiskinan bidang sosial budaya dan kelembagaan yang diimplementasikan di daerah tertinggal	77,5	Persentase	
	11.02 Persentase (%) program/kegiatan K/L untuk penanggulangan kemiskinan bidang pembangunan prasarana dan sarana yang diimplementasikan di daerah tertinggal	77,5	Persentase	
	11.03 Persentase (%) program/kegiatan K/L untuk penanggulangan kemiskinan bidang pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang diimplementasikan di daerah tertinggal	77,5	Persentase	
	11.04 Persentase (%) program/kegiatan K/L untuk penanggulangan kemiskinan pada daerah khusus yang diimplementasikan di daerah tertinggal	77,5	Persentase	
	Program Dukungan Manajemen			23.713.172
	SP13 Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi (RB)			
	SP16 Meningkatnya Pengawasan Internal			
	Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal			23.713.172
	01.01 Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	84	Nilai	
	01.02 Opini atas Pengendalian Internal atas Laporan Keuangan dan BMN Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	PIE	Kriteria	
	01.03 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	93	Nilai	
	01.04 Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	93	Nilai	
	01.05 Persentase produk hukum yang ditetapkan pada tahun yang bersangkutan	95	persentase	
	01.06 Rata-rata nilai Pengawasan KearsipanDirektorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	94,5	Nilai	



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA-151.05-0/2026



DS:7299-9857-9503-6991

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :

(dalam ribuan rupiah)

KODE	PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	VOLUME / SATUAN	ALOKASI DANA
01.07	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	71 Nilai	
01.08	Persentase (%) prasarana dan sarana kerja yang terpenuhi berdasarkan RKBMN	85 persentase	
02.01	Nilai rata rata Kematangan Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	71 Nilai	

KETENTUAN
DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.

Jakarta, 01 Desember 2025
a.n. MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
DIREKTUR JENDERAL PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH

Drs. Samsul Widodo, M.A.
NIP. 196802101997031001



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA-151.05-0/2026



DS:7299-9857-9503-6991

II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

Halaman : 1 dari 1

A. IDENTITAS UNIT :

1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA : 151 KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
2. UNIT ORGANISASI : 151.05 DIREKTORAT JENDERAL PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
3. PAGU : Rp.48.213.172.000
(EMPAT PULUH DELAPAN MILIAR DUA RATUS TIGA BELAS JUTA SERATUS TUJUH PULUH DUA RIBU RUPIAH)

B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA	KP KD DK TP UB	JENIS BELANJA				PAGU/TARGET PENDAPATAN	TERCATAT
				PEGAWAI	BARANG	MODAL	BANTUAN SOSIAL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5+6+7+8	10
	151.05.CT	Program Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	KP	0	24.500.000	0	0	24.500.000	0
	01	DKI JAKARTA		0	24.500.000	0	0	24.500.000	0
	694543	DIREKTORAT JENDERAL PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL		0	24.500.000	0	0	24.500.000	0
	A00	RM		0	24.500.000	0	0	24.500.000	0
	151.05.WA	Program Dukungan Manajemen	KP	2.926.648	20.786.524	0	0	23.713.172	0
	01	DKI JAKARTA		2.926.648	20.786.524	0	0	23.713.172	0
	694543	DIREKTORAT JENDERAL PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL		2.926.648	20.786.524	0	0	23.713.172	0
	A00	RM		2.926.648	20.786.524	0	0	23.713.172	0
		TOTAL		2.926.648	45.286.524	0	0	48.213.172	0
		RM		2.926.648	45.286.524	0	0	48.213.172	0
		PENDAPATAN						0	

KETENTUAN

DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.

Jakarta, 01 Desember 2025

a.n. MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
DIREKTUR JENDERAL PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH

Drs. Samsul Widodo, M.A.
NIP. 196802101997031001



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA-151.05-0/2026



DS:7299-9857-9503-6991

III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

Halaman : 1 dari 1

A. IDENTITAS UNIT :

1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA : 151 KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
2. UNIT ORGANISASI : 151.05 DIREKTORAT JENDERAL PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
3. PAGU : Rp.48.213.172.000
(EMPAT PULUH DELAPAN MILIAR DUA RATUS TIGA BELAS JUTA SERATUS TUJUH PULUH DUA RIBU RUPIAH)

B. RENCANA PER PROGRAM

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN PROGRAM	PAGU	JANUARI	PEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER
1	151.05.CT	Program Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal													
		RENCANA PENARIKAN DANA	24.500.000	0	141.720	1.379.171	1.755.874	4.133.491	2.871.400	2.905.024	3.207.314	2.332.675	2.104.120	2.022.760	1.646.451
2	151.05.WA	Program Dukungan Manajemen													
		RENCANA PENARIKAN DANA	23.713.172	912.074	1.094.612	1.457.639	2.094.480	2.457.537	3.191.651	2.644.390	2.733.596	2.734.036	2.319.866	1.299.434	773.859
		TOTAL RENCANA PENARIKAN DANA	48.213.172	912.074	1.236.332	2.836.810	3.850.354	6.591.028	6.063.050	5.549.414	5.940.909	5.066.710	4.423.986	3.322.195	2.420.309
		TOTAL PERKIRAAN / TARGET PENDAPATAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

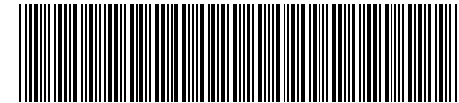
Jakarta, 01 Desember 2025

a.n. MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
DIREKTUR JENDERAL PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH

Drs. Samsul Widodo, M.A.
NIP. 196802101997031001



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA-151.11-0/2026**



DS:7274-0695-5290-2549

A. DASAR HUKUM :

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

B. DENGAN INI DISAHKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK :

- | | | |
|--------------------------------|---|--|
| 1. KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA | : | 151 KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL |
| 2. UNIT ORGANISASI | : | 151.11 BADAN PENGEMBANGAN DAN INFORMASI DESA DAN DAERAH TERTINGGAL |
| 3. PAGU | : | Rp.68.463.532.000 |
- (ENAM PULUH DELAPAN MILIAR EMPAT RATUS ENAM PULUH TIGA JUTA LIMA RATUS TIGA PULUH DUA RIBU RUPIAH)

C. PERNYATAAN SYARAT DAN KETENTUAN(DISCLAIMER) :

1. DIPA Induk yang telah disahkan ini lebih lanjut dituangkan kedalam DIPA Petikan untuk masing-masing Satker.
2. Pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan pengesahan DIPA Petikan.
3. DIPA Induk tidak berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan atau dasar pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA Induk merupakan akumulasi rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan dari seluruh satker.
5. Tanggung jawab terhadap kebenaran alokasi yang tertuang dalam DIPA Induk sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. DIPA Induk ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

LUKY ALFIRMAN
NIP.197003271995031002



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA-151.11-0/2026



DS:7274-0695-5290-2549

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

Halaman : 1 dari 4

A. IDENTITAS UNIT :

1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA	: 151	KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
2. UNIT ORGANISASI	: 11	BADAN PENGEMBANGAN DAN INFORMASI DESA DAN DAERAH TERTINGGAL
3. PAGU	: Rp.68.463.532.000	
(ENAM PULUH DELAPAN MILIAR EMPAT RATUS ENAM PULUH TIGA JUTA LIMA RATUS TIGA PULUH DUA RIBU RUPIAH)		

B. KETERKAITAN DENGAN PROGRAM, SASARAN STRATEGIS K/L, FUNGSI, DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DALAM RKP :

(dalam ribuan rupiah)

1. PROGRAM	: 151.11.CT	Program Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	17.052.206
	: 151.11.WA	Program Dukungan Manajemen	51.411.326
2. SASARAN STRATEGIS K/L	: 01	Berkembangnya status pembangunan desa	
	: 02	Menurunnya angka kemiskinan desa	
	: 03	Meningkatnya kapasitas desa dan perdesaan serta daerah tertinggal berdaya saing secara ekonomi yang bersinergi dengan pembangunan perkotaan dan wilayah sekitarnya serta memiliki ketahanan sosial dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan	
	: 04	Meningkatnya kualitas hidup dengan dipenuhinya akses terhadap layanan dasar dan infrastruktur dan perdesaan	
	: 05	Meningkatnya tata kelola dan pemberdayaan desa adaptif	
	: 06	Meningkatnya transformasi pembangunan daerah tertinggal dan sangat tertinggal	
	: 07	Meningkatkan kualitas implementasi kebijakan desa dan perdesaan serta daerah tertinggal	
	: 08	Meningkatkan layanan penyediaan data dan informasi perdesaan	
	: 09	Terwujudnya organisasi yang memiliki kapasitas dan reformasi birokrasi yang berkualitas	
	: 10	Terwujudnya organisasi yang baik dalam pengawasan, pengendalian dan akuntabilitas aparatur serta aturan yang efektif	
	: 11	Meningkatnya kapasitas SDM kementerian dan SDM desa dan daerah tertinggal	
	: 12	Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan yang berbasis pada ilmu pengetahuan, inovasi, serta data dan informasi dalam keterpaduan rencana untuk meningkatkan daya saing pembangunan desa dan daerah tertinggal	
3. FUNGSI	: 06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	68.463.532
SUB FUNGSI	: 0690	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA	68.463.532
4. PRIORITAS NASIONAL	: 06	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	5.552.206
NON PRIORITAS NASIONAL	:		62.911.326



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA-151.11-0/2026



I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

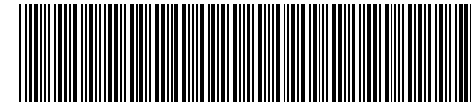
C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :

(dalam ribuan rupiah)

KODE	PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	VOLUME / SATUAN	ALOKASI DANA
151.11.CT	Program Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal		17.052.206
SP05	Meningkatnya implementasi kebijakan pembangunan desa dan daerah tertinggal serta layanan data desa terpublikasi		
IKP01	Persentase hasil rumusan kebijakan pembangunan desa dan daerah tertinggal yang diimplementasikan dan/atau menjadi rujukan	65 Persentase (%)	
IKP02	Persentase kepuasan atas layanan data desa yang terpublikasi	85 Persentase (%)	
7330	Pengelolaan Data dan Informasi Eksternal		5.552.206
01.01	Persentase (%) data Indeks Desa yang divalidasi	100 Persentase (%)	
01.02	Persentase (%) data Monitoring dan Evaluasi Dana Desa yang divalidasi	100 Persentase (%)	
01.03	Persentase (%) data indeks resiko iklim desa yang diverifikasi	100 Persentase (%)	
7331	Pengembangan Kebijakan, Keterpaduan Rencana, dan Evaluasi Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal		6.500.000
01.01	Persentase dokumen kebijakan pembangunan desa dan daerah tertinggal yang disusun	90 Persentase (%)	
01.02	Persentase dokumen pendukung keterpaduan perencanaan pembangunan desa dan daerah tertinggal yang dimanfaatkan	75 Persentase (%)	
01.03	Persentase (%) kebijakan pembangunan desa dan daerah tertinggal yang dievaluasi	100 Persentase (%)	
7332	Pengembangan Daya Saing Desa dan Daerah Tertinggal		5.000.000
01.01	Persentase (%) model pengembangan daya saing desa dan daerah tertinggal yang disusun	90 Persentase (%)	
151.11.WA	Program Dukungan Manajemen		51.411.326
SP13	Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi (RB)		



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA-151.11-0/2026



DS:7274-0695-5290-2549

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

Halaman : 3 dari 4

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :

(dalam ribuan rupiah)

KODE	PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	VOLUME / SATUAN		ALOKASI DANA
SP15	Meningkatnya Kualitas Kebijakan, Layanan Data, dan Sistem Informasi			
SP16	Meningkatnya Pengawasan Internal			
7346	Pengelolaan Data dan Informasi Internal			27.000.000
	01.01 Persentase (%) kelengkapan dan keakuratan dokumen pendukung penilaian pemerintahan digital dalam meningkatkan nilai Indeks PEMDI	100	Persentase (%)	
	02.01 Persentase (%) kelengkapan dan keakuratan dokumen penilaian Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor (EPSS) dalam mendukung peningkatan indeks pembangunan statistik	100	Persentase (%)	
7347	Dukungan Manajemen Eselon I Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal			24.411.326
	01.01 Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal	84	Kategori	
	01.02 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran di Lingkungan Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal	93	Nilai	
	01.03 Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) di Lingkungan Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal	94	Nilai	
	01.04 Persentase (%) produk hukum yang ditetapkan pada tahun yang bersangkutan	95	Persentase (%)	
	01.05 Nilai rata-rata Pengawasan Kearsipan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal	91	Nilai	
	01.06 Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal	71	Nilai	
	01.07 Opini atas Pengendalian Internal atas Laporan Keuangan dan BMN di Lingkungan Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal	PIE	Kriteria	
	01.08 Persentase (%) prasarana dan sarana kerja yang terpenuhi	85	Persentase (%)	
	02.01 Nilai rata-rata Kematangan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal	71	Nilai	
	03.01 Persentase (%) kelengkapan dan kesesuaian dokumen dalam pengukuran IKK	100	Persentase (%)	

Jakarta, 01 Desember 2025
a.n Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal

Dr. Drs. Mulyadin Malik, M.Si., CIGS
197202241992031008



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA-151.11-0/2026**



DS:7274-0695-5290-2549

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

Halaman : 4 dari 4

KETENTUAN

DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.

Jakarta, 01 Desember 2025
a.n Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal

Dr. Drs. Mulyadin Malik, M.Si., CIGS
197202241992031008



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA-151.11-0/2026



DS:7274-0695-5290-2549

II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

Halaman : 1 dari 1

A. IDENTITAS UNIT :

1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA : 151 KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
2. UNIT ORGANISASI : 151.11 BADAN PENGEMBANGAN DAN INFORMASI DESA DAN DAERAH TERTINGGAL
3. PAGU : Rp.68.463.532.000
(ENAM PULUH DELAPAN MILIAR EMPAT RATUS ENAM PULUH TIGA JUTA LIMA RATUS TIGA PULUH DUA RIBU RUPIAH)

B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA	KP KD DK TP UB	JENIS BELANJA				PAGU/TARGET PENDAPATAN	TERCATAT
				PEGAWAI	BARANG	MODAL	BANTUAN SOSIAL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5+6+7+8	10
	151.11.CT	Program Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	KP	0	13.852.206	3.200.000	0	17.052.206	3.200.000
	01	DKI JAKARTA		0	13.852.206	3.200.000	0	17.052.206	3.200.000
	694613	BADAN PENGEMBANGAN DAN INFORMASI DESA DAN DAERAH TERTINGGAL		0	13.852.206	3.200.000	0	17.052.206	3.200.000
	A00	RM		0	13.852.206	3.200.000	0	17.052.206	3.200.000
	151.11.WA	Program Dukungan Manajemen	KP	3.441.917	33.688.159	14.281.250	0	51.411.326	17.110.000
	01	DKI JAKARTA		3.441.917	33.688.159	14.281.250	0	51.411.326	17.110.000
	694613	BADAN PENGEMBANGAN DAN INFORMASI DESA DAN DAERAH TERTINGGAL		3.441.917	33.688.159	14.281.250	0	51.411.326	17.110.000
	A00	RM		3.441.917	33.688.159	14.281.250	0	51.411.326	17.110.000
		TOTAL		3.441.917	47.540.365	17.481.250	0	68.463.532	20.310.000
		RM		3.441.917	47.540.365	17.481.250	0	68.463.532	20.310.000
		PENDAPATAN						0	

KETENTUAN

DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.

Jakarta, 01 Desember 2025

a.n Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA-151.11-0/2026
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:7274-0695-5290-2549

A. IDENTITAS UNIT :

1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA : 151 KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
2. UNIT ORGANISASI : 151.11 BADAN PENGEMBANGAN DAN INFORMASI DESA DAN DAERAH TERTINGGAL
3. PAGU : Rp.68.463.532.000
(ENAM PULUH DELAPAN MILIAR EMPAT RATUS ENAM PULUH TIGA JUTA LIMA RATUS TIGA PULUH DUA RIBU RUPIAH)

B. RENCANA PER PROGRAM

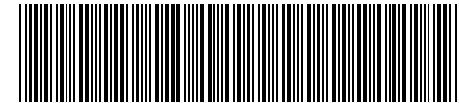
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN PROGRAM	PAGU	JANUARI	PEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER
1	151.11.CT	Program Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal													
		RENCANA PENARIKAN DANA	17.052.206	705.694	2.055.692	2.185.554	1.143.664	1.322.838	1.073.196	1.432.260	1.538.753	1.637.974	1.625.543	1.361.910	969.127
2	151.11.WA	Program Dukungan Manajemen													
		RENCANA PENARIKAN DANA	51.411.326	2.688.468	3.702.888	4.090.616	5.249.719	4.906.434	2.635.648	2.680.512	5.843.189	4.295.569	4.966.862	5.280.619	5.070.802
		TOTAL RENCANA PENARIKAN DANA	68.463.532	3.394.162	5.758.580	6.276.170	6.393.383	6.229.273	3.708.845	4.112.772	7.381.942	5.933.544	6.592.405	6.642.529	6.039.929
		TOTAL PERKIRAAN / TARGET PENDAPATAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Jakarta, 01 Desember 2025
a.n Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA-151.12-0/2026**



DS:8048-4369-8044-0297

A. DASAR HUKUM :

- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

B. DENGAN INI DISAHKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK :

- | | | |
|--------------------------------|---|--|
| 1. KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA | : | 151 KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL |
| 2. UNIT ORGANISASI | : | 151.12 BADAN PENGEMBANGAN SDM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN DAERAH TERTINGGAL |
| 3. PAGU | : | Rp.1.317.128.795.000 |
- (SATU TRILIUN TIGA RATUS TUJUH BELAS MILIAR SERATUS DUA PULUH DELAPAN JUTA TUJUH RATUS SEMBILAN PULUH LIMA RIBU RUPIAH)

C. PERNYATAAN SYARAT DAN KETENTUAN(DISCLAIMER) :

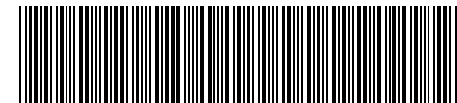
- DIPA Induk yang telah disahkan ini lebih lanjut dituangkan kedalam DIPA Petikan untuk masing-masing Satker.
- Pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan pengesahan DIPA Petikan.
- DIPA Induk tidak berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan atau dasar pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA Induk merupakan akumulasi rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan dari seluruh satker.
- Tanggung jawab terhadap kebenaran alokasi yang tertuang dalam DIPA Induk sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- DIPA Induk ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

LUKY ALFIRMAN
NIP.197003271995031002



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA-151.12-0/2026



DS:8048-4369-8044-0297

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

Halaman : 1 dari 3

A. IDENTITAS UNIT :

1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA	: 151	KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
2. UNIT ORGANISASI	: 12	BADAN PENGEMBANGAN SDM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN DAERAH TERTINGGAL
3. PAGU	: Rp.1.317.128.795.000	(SATU TRIIUN TIGA RATUS TUJUH BELAS MILIAR SERATUS DUA PULUH DELAPAN JUTA TUJUH RATUS SEMBILAN PULUH LIMA RIBU RUPIAH)

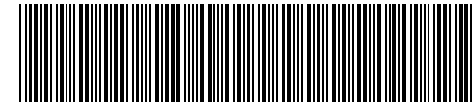
B. KETERKAITAN DENGAN PROGRAM, SASARAN STRATEGIS K/L, FUNGSI, DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DALAM RKP :

(dalam ribuan rupiah)

1. PROGRAM	: 151.12.CT	Program Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	1.251.217.992
	: 151.12.WA	Program Dukungan Manajemen	65.910.803
2. SASARAN STRATEGIS K/L	: 01	Berkembangnya status pembangunan desa	
	: 02	Menurunnya angka kemiskinan desa	
	: 03	Meningkatnya kapasitas desa dan perdesaan serta daerah tertinggal berdaya saing secara ekonomi yang bersinergi dengan pembangunan perkotaan dan wilayah sekitarnya serta memiliki ketahanan sosial dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan	
	: 04	Meningkatnya kualitas hidup dengan dipenuhinya akses terhadap layanan dasar dan infrastruktur dan perdesaan	
	: 05	Meningkatnya tata kelola dan pemberdayaan desa adaptif	
	: 06	Meningkatnya transformasi pembangunan daerah tertinggal dan sangat tertinggal	
	: 07	Meningkatkan kualitas implementasi kebijakan desa dan perdesaan serta daerah tertinggal	
	: 08	Meningkatkan layanan penyediaan data dan informasi perdesaan	
	: 09	Terwujudnya organisasi yang memiliki kapasitas dan reformasi birokrasi yang berkualitas	
	: 10	Terwujudnya organisasi yang baik dalam pengawasan, pengendalian dan akuntabilitas aparatur serta aturan yang efektif	
	: 11	Meningkatnya kapasitas SDM kementerian dan SDM desa dan daerah tertinggal	
	: 12	Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan yang berbasis pada ilmu pengetahuan, inovasi, serta data dan informasi dalam keterpaduan rencana untuk meningkatkan daya saing pembangunan desa dan daerah tertinggal	
3. FUNGSI	: 06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	1.317.128.795
SUB FUNGSI	: 0690	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA	1.317.128.795
4. PRIORITAS NASIONAL	: 06	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	1.246.224.130
NON PRIORITAS NASIONAL	:		70.904.665



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA-151.12-0/2026



DS:8048-4369-8044-0297

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

Halaman : 2 dari 3

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :

(dalam ribuan rupiah)

KODE	PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	VOLUME / SATUAN	ALOKASI DANA
151.12.CT	Program Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal		1.251.217.992
SP03	Meningkatnya peran pendampingan dalam perencanaan dan pembangunan desa		
IKP01	Persentase dana desa dalam APBDes sesuai dengan fokus prioritas penggunaan dana desa	82,5 Persentase (%)	
IKP02	Persentase alumni pelatihan yang mengimplementasikan hasil pelatihan pembangunan desa	20 Persentase (%)	
7327	Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal		28.741.034
01.01	Persentase KPMD yang mendapatkan pelatihan di bidang pembangunan desa	20 Persentase (%)	
7328	Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal		1.222.476.958
01.01	Persentase Tenaga Pendamping Profesional (TPP) yang berkinerja baik dalam pendampingan Desa	62,5 Persentase (%)	
151.12.WA	Program Dukungan Manajemen		65.910.803
SP13	Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi (RB)		
SP14	Meningkatnya kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN)		
IKP01	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	22,5 Persentase (%)	
SP16	Meningkatnya Pengawasan Internal		
7338	Dukungan Manajemen Eselon I Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal		55.410.803
01.01	Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal	84 Nilai	



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA-151.12-0/2026



DS:8048-4369-8044-0297

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

Halaman : 3 dari 3

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :

(dalam ribuan rupiah)

KODE	PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	VOLUME / SATUAN		ALOKASI DANA
7339	01.02 Opini atas Pengendalian Internal atas Laporan Keuangan dan BMN di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal	PIE	Kriteria	10.500.000
	01.03 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal	93	Nilai	
	01.04 Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal	94	Nilai	
	01.05 Persentase produk hukum yang ditetapkan pada tahun yang bersangkutan	95	Persentase (%)	
	01.06 Rata-rata nilai Pengawasan Kearsipan di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal	91	Nilai	
	01.07 Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal	71	Nilai	
	01.08 Presentase prasarana dan sarana kerja yang terpenuhi	85	Persentase (%)	
	02.01 Nilai rata rata Kematangan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal	71	Nilai	
	Pelatihan dan Pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara			
	01.01 Persentase ASN Kementerian Desa dan PDT yang diberikan pelatihan berdasarkan Analisis Kebutuhan Pelatihan (AKP)	18	Persentase (%)	
	02.01 Persentase modul penggerakan swadaya masyarakat untuk melaksanakan rencana aksi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	20	Persentase (%)	
	02.02 Persentase Pejabat Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat yang memenuhi standar kompetensi	100	Persentase (%)	

KETENTUAN

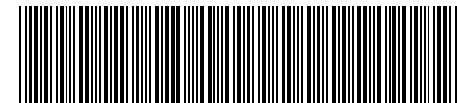
DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.

Jakarta, 01 Desember 2025
a.n. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan

Dr. Agustomi Masik, M.Dev.Plg.
NIP. 197208081993021003



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA-151.12-0/2026



DS:8048-4369-8044-0297

II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

Halaman : 1 dari 3

A. IDENTITAS UNIT :

1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA : 151 KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
2. UNIT ORGANISASI : 151.12 BADAN PENGEMBANGAN SDM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN DAERAH TERTINGGAL
3. PAGU : Rp.1.317.128.795.000
(SATU TRILIUN TIGA RATUS TUJUH BELAS MILIAR SERATUS DUA PULUH DELAPAN JUTA TUJUH RATUS SEMBILAN PULUH LIMA RIBU RUPIAH)

B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA	KP KD DK TP UB	JENIS BELANJA				PAGU/TARGET PENDAPATAN	TERCATAT
				PEGAWAI	BARANG	MODAL	BANTUAN SOSIAL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5+6+7+8	10
	151.12.CT	Program Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal		0	1.251.217.992	0	0	1.251.217.992	0
	01	DKI JAKARTA		0	1.234.776.054	0	0	1.234.776.054	0
	694604	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	KP	0	1.229.476.958	0	0	1.229.476.958	0
	A00	RM		0	1.229.476.958	0	0	1.229.476.958	0
	694606	BALAI BESAR PELATIHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN DAERAH TERTINGGAL	KP	0	5.299.096	0	0	5.299.096	0
	A00	RM		0	5.299.096	0	0	5.299.096	0
	19	SULAWESI SELATAN		0	3.783.450	0	0	3.783.450	0
	694608	BALAI PELATIHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN DAERAH TERTINGGAL	KD	0	3.783.450	0	0	3.783.450	0
	A00	RM		0	3.783.450	0	0	3.783.450	0
	21	MALUKU		0	3.631.595	0	0	3.631.595	0
	694602	BALAI PELATIHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN DAERAH TERTINGGAL	KD	0	3.631.595	0	0	3.631.595	0
	A00	RM		0	3.631.595	0	0	3.631.595	0
	25	PAPUA		0	5.828.579	0	0	5.828.579	0
	694603	BALAI PELATIHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN DAERAH TERTINGGAL	KD	0	5.828.579	0	0	5.828.579	0
	A00	RM		0	5.828.579	0	0	5.828.579	0
	26	BENGKULU		0	3.198.314	0	0	3.198.314	0
	694605	BALAI PELATIHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN DAERAH TERTINGGAL	KD	0	3.198.314	0	0	3.198.314	0
	A00	RM		0	3.198.314	0	0	3.198.314	0

KETENTUAN

DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA-151.12-0/2026



DS:8048-4369-8044-0297

II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

Halaman : 2 dari 3

A. IDENTITAS UNIT :

1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA : 151 KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
2. UNIT ORGANISASI : 151.12 BADAN PENGEMBANGAN SDM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN DAERAH TERTINGGAL
3. PAGU : Rp.1.317.128.795.000
(SATU TRILIUN TIGA RATUS TUJUH BELAS MILIAR SERATUS DUA PULUH DELAPAN JUTA TUJUH RATUS SEMBILAN PULUH LIMA RIBU RUPIAH)

B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

(dalam ribuan rupiah)

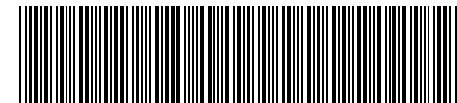
NO	KODE	PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA	KP KD DK TP UB	JENIS BELANJA				PAGU/TARGET PENDAPATAN	TERCATAT
				PEGAWAI	BARANG	MODAL	BANTUAN SOSIAL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5+6+7+8	10
	151.12.WA	Program Dukungan Manajemen		5.382.471	49.937.895	10.590.437	0	65.910.803	0
	01	DKI JAKARTA		3.775.444	37.864.406	10.430.195	0	52.070.045	0
	694604	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	KP	3.242.250	34.201.159	10.430.195	0	47.873.604	0
	A00	RM		3.242.250	34.201.159	10.430.195	0	47.873.604	0
	694606	BALAI BESAR PELATIHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN DAERAH TERTINGGAL	KP	533.194	3.663.247	0	0	4.196.441	0
	A00	RM		533.194	3.663.247	0	0	4.196.441	0
	19	SULAWESI SELATAN		502.124	3.502.787	71.500	0	4.076.411	0
	694608	BALAI PELATIHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN DAERAH TERTINGGAL	KD	502.124	3.502.787	71.500	0	4.076.411	0
	A00	RM		502.124	3.502.787	71.500	0	4.076.411	0
		Target Pendapatan						6.192	
	21	MALUKU		408.293	2.980.370	40.400	0	3.429.063	0
	694602	BALAI PELATIHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN DAERAH TERTINGGAL	KD	408.293	2.980.370	40.400	0	3.429.063	0
	A00	RM		408.293	2.980.370	40.400	0	3.429.063	0
	25	PAPUA		368.491	2.130.681	0	0	2.499.172	0
	694603	BALAI PELATIHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN DAERAH TERTINGGAL	KD	368.491	2.130.681	0	0	2.499.172	0
	A00	RM		368.491	2.130.681	0	0	2.499.172	0
	26	BENGKULU		328.119	3.459.651	48.342	0	3.836.112	0
	694605	BALAI PELATIHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN DAERAH TERTINGGAL	KD	328.119	3.459.651	48.342	0	3.836.112	0

KETENTUAN

DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA-151.12-0/2026



DS:8048-4369-8044-0297

II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

Halaman : 3 dari 3

A. IDENTITAS UNIT :

1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA : 151 KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
2. UNIT ORGANISASI : 151.12 BADAN PENGEMBANGAN SDM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN DAERAH TERTINGGAL
3. PAGU : Rp.1.317.128.795.000
(SATU TRILIUN TIGA RATUS TUJUH BELAS MILIAR SERATUS DUA PULUH DELAPAN JUTA TUJUH RATUS SEMBILAN PULUH LIMA RIBU RUPIAH)

B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA	KP KD DK TP UB	JENIS BELANJA				PAGU/TARGET PENDAPATAN	TERCATAT
				PEGAWAI	BARANG	MODAL	BANTUAN SOSIAL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5+6+7+8	10
	A00	RM Target Pendapatan		328.119	3.459.651	48.342	0	3.836.112 387.000	0
		TOTAL		5.382.471	1.301.155.887	10.590.437	0	1.317.128.795	0
		RM PENDAPATAN		5.382.471	1.301.155.887	10.590.437	0	1.317.128.795 393.192	0

KETENTUAN

DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.

Jakarta, 01 Desember 2025
a.n. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA-151.12-0/2026
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:8048-4369-8044-0297

A. IDENTITAS UNIT :

1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA : 151 KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
2. UNIT ORGANISASI : 151.12 BADAN PENGEMBANGAN SDM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN DAERAH TERTINGGAL
3. PAGU : Rp.1.317.128.795.000
(SATU TRILIUN TIGA RATUS TUJUH BELAS MILIAR SERATUS DUA PULUH DELAPAN JUTA TUJUH RATUS SEMBILAN PULUH LIMA RIBU RUPIAH)

B. RENCANA PER PROGRAM

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN PROGRAM	PAGU	JANUARI	PEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER
1	151.12.CT	Program Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal													
		RENCANA PENARIKAN DANA	1.251.217.992	102.153.111	102.519.824	103.796.069	104.277.646	104.377.646	104.725.094	104.801.950	105.122.762	105.021.230	105.286.971	104.901.607	104.234.084
2	151.12.WA	Program Dukungan Manajemen													
		RENCANA PENARIKAN DANA	65.910.803	2.968.251	4.945.442	6.137.917	6.543.777	5.987.720	8.075.017	5.926.213	5.267.970	4.627.259	4.850.683	4.861.018	5.719.536
		PERKIRAAN / TARGET PENDAPATAN	393.192	32.766	32.766	32.766	32.766	32.766	32.766	32.766	32.766	32.766	32.766	32.766	32.766
		TOTAL RENCANA PENARIKAN DANA	1.317.128.795	105.121.362	107.465.266	109.933.986	110.821.422	110.365.366	112.800.111	110.728.162	110.390.732	109.648.488	110.137.654	109.762.625	109.953.620
		TOTAL PERKIRAAN / TARGET PENDAPATAN	393.192	32.766	32.766	32.766	32.766	32.766	32.766	32.766	32.766	32.766	32.766	32.766	32.766

Jakarta, 01 Desember 2025
a.n. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan

Dr. Agustomi Masik, M.Dev.Plg.
NIP. 197208081993021003